

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Wulan Oktavia Simbolon
NPM : 20510007
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : KAPABILITAS AUDITOR ATAS TINGKAT EFEKTIVITAS RED FLAGS DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (FRAUD) PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA MEDAN

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menepuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



(Dr. Magdalena J. Siringoringo S.E., M.Si)



Dekan

(Dr. E. Hamonangan Siallagan S.E., M.Si)

Pembimbing pendamping



(Danri Toni Siboro, SE., M.Si Akt)

Ketua Program Studi



(Dr. E. Manatap Berfiana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak, CA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pertumbuhan skandal akuntansi di berbagai negara merupakan suatu tantangan besar bagi profesi akuntansi di dunia. Di Indonesia dikenal dengan negara berkembang telah banyak menciptakan perusahaan-perusahaan baru yang pasti akan membutuhkan karyawan. Karyawan yang dibutuhkan harus memenuhi syarat di perusahaan tersebut agar dapat diterima di perusahaan yang diinginkan. Namun demi keuntungan personal, para karyawan sering menyalahgunakan jabatan ataupun pekerjaan mereka, untuk menambahkan keuntungan personal mereka biasanya melakukan *kecurangan (fraud)*.

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (memanipulasi ataupun memberikan informasi yang keliru kepada pihak lain) dilakukan di dalam atau luar organisasi yang dapat merugikan pihak lain secara tidak langsung dan mendapatkan keuntungan secara langsung baik pribadi maupun kelompok. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menggambarkan *occupational fraud* dalam tiga kelompok besar yaitu : korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan atas pernyataan laporan keuangan yang menyesatkan. Menurut Kartikasari dan Irianto, dalam Rustiarini & Novitasari, (2014) . ACFE menggunakan The Fraud Triangle sebagai model dalam berbagai penelitian terkait

kecurangan. Konsep Fraud Triangle yang di perkenalkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953 menekankan tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan yaitu tekanan (*pressure/incentive*), kesempatan (*opportunity*), dan sikap untuk merasionalisasikan tindakan (*rationalization/attitude*). Berbeda dengan teori fraud Triangle, muncul konsep lainnya yaitu Teori fraud Diamond. Di dalam konsep fraud diamond ini ada perbedaan dengan menambahkan satu faktor yaitu kemampuan (*capability*).

Wolfe dan Hermanson, dalam Siddiq & Hadinata, (2016). Tekanan terjadi apabila stabilitas keuangan terancam, terdapat persaingan pasar atau kegagalan bisnis, laba yang tinggi dari pemegang saham sehingga manajemen terancam memiliki kinerja yang rendah, ketamakan atau keasyikan dengan kesuksesan, gaya hidup melebihi kemampuan. Kesempatan umumnya timbul di dalam sistem pengendalian yang lemah. Standard Operasional Prosedur (SOP) yang di perusahaan tidak dijalankan dengan disiplin yang tinggi, adanya karyawan yang memiliki rangkap jabatan, kurangnya pengawasan terhadap kinerja karyawan, penggunaan sistem atau teknologi yang tidak di perbaharui secara bertahap, kurangnya tindakan punishment (hukuman) bagi pelanggar kebijakan meskipun pelanggaran ringan. Rasionalisme adalah sikap yang melakukan tindakan justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Rasionalisasi umumnya berkaitan dengan integritas, kode etik dan nilai nilai yang dianut oleh seseorang. Rasionalisasi umumnya disebabkan oleh perasaan digaji terlalu rendah, percaya dipekerjakan berlebihan, perasaan bahwa semua orang melakukan hal yang sama, harga diri atau moral yang rendah, keinginan untuk balas dendam, percaya bahwa

fraud merupakan utang dan akan dibayar kembali, kepercayaan bahwa tidak seorompokun yang rugi, asumsi bahwa fraud hanya sementara. Kemampuan berkaitan dengan adanya kemampuan yang dibutuhkan dalam menjadi pelaku kecurangan. Sifat yang terkait dengan kemampuan tersebut adalah posisi seseorang dalam sebuah organisasi memberikan kemampuan untuk melakukan kecurangan, pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan kreatif atas kelemahan pengendalian intern, pelaku memiliki ego yang kuat dan keyakinan bahwa kecurangan tidak akan terdeteksi, pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan kecurangan tersebut, kecurangan yang sukses memerlukan kebohongan yang efektif dan konsisten, pelaku harus mampu mengendalikan stress.

Salah satu skandal konflik audit yang terjadi di kota medan yaitu kasus pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yaitu kasus Kepala Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M Yasin & Rekan. Hasnil didakwa menyelewengkan pajak penghasilan pada tahun 2001 dan 2002 di Kabupaten Langkat bersama Sekda Langkat Surya Djahisa. Dalam dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hasnil didakwa melakukan tindakan pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Jaksa Choirun Parapat, menyatakan bahwa Surya Djahisa, saat menjabat Kabag Keuangan Pemkab Langkat menunjuk KAP Hasnil M Yamin & Rekan, guna menyusun perubahan tarif pada pajak penghasilan PPH pasal 21 untuk tahun fiskal 2001 dan 2002, untuk disesuaikan dengan tarif yang baru. Pemkab Langkat memperoleh dana kompensasi atau resitusi sebesar Rp 5,9 miliar. Sesuai surat perjanjian, KAP

Hasnil M Yamin & Rekan memperoleh honorium sebesar 20% dari Rp 5,9 miliar yaitu Rp 1,19 miliar. Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 400 juta dan Surya Djahisa mendapat bagian sekitar Rp 793 juta. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian Rp 1,19 miliar, nilai kerugian ini sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. Seperti halnya Surya Djahisa, pada persidangan sebelumnya, JPU mendakwa Hasnil telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Fenomena lainnya adalah Metro 24 jam merilis kasus perkara pengadaan mobil Bank Sumut, dimana mantan auditor BPKP perwakilan Sumut, mengatakan hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) oleh investigatif Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad bertentangan dengan Undang-Undang. Pengadaan sewa menyewa 294 unit mobil dinas operasional senilai Rp 18 Miliar yang bersumber dari Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2013, dengan terdakwa Muhammad Yahya selaku mantan Direktur Operasional (Dirops) bank Sumut. Auditor dari audit investigatif Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad dari Kota Semarang menyebutkan dalam kasus ini kerugian negara sebesar Rp 10.8 miliar dari Rp 18 miliar. Karena audit yang dilakukan Tarmizi Achmad berdasarkan standar pemeriksaan, sehingga bertentangan dengan Undang-undang RI No 15 Tahun 2004 tentang Akuntan Publik. Mantan auditor BPKP menyebutkan bahwa auditor Tarmizi Achmad bernama Hernold Ferry Makawimbang bukanlah lulusan pendidikan akuntansi, sehingga diragukan dan

tidak berwenang menandatangani laporan audit, dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.

Peran audit internal membantu manajemen untuk memeriksa, mengevaluasi, melaporkan dan merekomendasikan perbaikan kecukupan dan efektivitas proses manajemen resiko. Oleh karena itu di butuhkan faktor demografi auditor untuk mendeteksi kecurangan yaitu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, masa kerja, dan pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai standard dan terus meningkatkan kemahiran dan efektivitas.

Masa kerja atau lama bekerja seorang auditor menunjukkan banyaknya pengalaman yang telah dimiliki oleh seorang auditor maka akan meningkatkan keahlian dan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Auditor yang memiliki pendidikan yang tinggi akan menemukan penyelewengan yang tinggi tergantung pada kemampuan teknikan Auditor . Pengalaman audit dengan tingkat kompleksitas tugas yang beragam akan memperkecil kesalahan, ketidakberesan dan terjadi pelanggaran saat pelaksanaan tugas pemeriksaan dilakukan oleh auditor. Auditor yang telah mendapat pelatihan dan pendeteksian fraud memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan yang lebih baik (Rustiarini & Novitasari, 2014). Pelatihan audit kecurangan adalah salah satu pelatihan agar mampu menginvestigasi dan mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Putri (2017) dalam (Gizta, 2020) menunjukkan bahwa fraud audit training yang diukur dengan jumlah jam pelatihan yang telah diikuti auditor berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Dengan adanya faktor demografi tersebut, auditor diharapkan memiliki tingkat *fraud awareness* yang lebih tinggi.

Mendeteksi kecurangan bukanlah tugas yang mudah karena membutuhkan pengetahuan yang komprehensif mengenai karakteristik dan cara melakukan kecurangan. Pendeteksian kecurangan juga tidak selalu mendapatkan titik terang karena berbagai motivasi yang mendasari, dan banyaknya metode dalam melakukan kecurangan Kassem dan Higson, 2012 dalam Rustiarini & Novitasari, (2014) . Alasan tersebut memberikan penegasan bahwa auditor memerlukan indikator atau tanda (*red flags*) untuk memfokuskan kinerja dalam melakukan penaksiran resiko kecurangan, *Red Flags* merupakan gejala potensial yang memerlukan penyidikan lebih dalam, yang mengindikasikan resiko lebih tinggi dari salah saji yang di sengaja pada laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa *Red Flags* merupakan peringatan dini (*early warning signal*) sehingga dapat mengurangi resiko tingkat terdeteksi nya kecurangan oleh auditor. *Red Flag* ini dapat digunakan pada setiap perusahaan agar semakin akurat dan komprehensif catatan pembukuan yang dimiliki oleh perusahaan, semakin efektif teknik ini dalam mendeteksi kecurangan. *Red Flags* menurut Dinapoli adalah “ *a set of circumstances that are unusual in nature or vary form the normalactivity*” atau keadaan yang tidak biasa terjadi atau variasi dari aktivitas normal. SAS No 99 mengharuskan auditor eksternal untuk menggunakan *red flags* dalam mendeteksi kecurangan. Setiap auditor tentunya memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai tingkat efektivitas red flags dikarenakan berbagai faktor individual.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Smith et al. (2005), Moyes et al. (2006), Moyes dan Baker (2009), Yang et al. (2009), Hegazy dan Kassem (2010) dalam Rustiarini & Novitasari, (2014) menunjukkan adanya pengaruh faktor

demografi auditor seperti gender, posisi pekerjaan, masa kerja, pendidikan, pengalaman, dan pelatihan pada persepsi auditor atas penilaian *red flags*. Berdasarkan perspektif gender, Moyes dan Baker (2009) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu posisi pekerjaan tidak berpengaruh pada efektivitas penggunaan *red flags*. Masa kerja auditor juga dianggap berpengaruh pada penggunaan *red flags* dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian Hegazy dan Kassem (2010) menunjukkan adanya pengaruh masa kerja pada persepsi auditor atas efektivitas *red flags*. Selain itu auditor dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan Yang et al & Moyes dan baker, (2009) mendeteksi kecurangan merupakan tugas yang berat bagi seseorang auditor apabila tidak pernah sekalipun menerima penugasan tersebut semasa karirnya Montgomery et al, (2002). Hasil penelitian Moyes dan Baker, (2009) menunjukkan auditor memiliki pengalaman mendeteksi kecurangan memiliki efektivitas penggunaan *red flags* yang lebih tinggi daripada auditor yang tidak berpengalaman. Selain pengalaman, salah satu cara auditor untuk meningkatkan kompetensi adalah dengan mengikuti pelatihan mengenai kecurangan. Hasil penelitian Yang et al, (2009) menemukan bahwa auditor yang pernah mengikuti pelatihan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan.

Terjadinya berbagai kecurangan tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, salah satunya auditor eksternal yang menjadi harapan masyarakat untuk dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Alasan tersebutlah yang membuat dasar bahwa penelitian mengenai efektivitas red flags sangatlah penting dan menarik untuk dilakukan pada auditor yang bekerja di

Kantor Akuntan Publik. Inilah yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian kali ini, berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Kapabilitas Auditor Atas Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud) Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah yang hendak di teliti oleh penelitian ini adalah:

1. Apakah Kapabilitas (masa kerja) berpengaruh terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah Kapabilitas (pendidikan) berpengaruh terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah Kapabilitas (pengalaman) berpengaruh terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah Kapabilitas (pelatihan) berpengaruh terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kapabilitas (masa kerja) terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kapabilitas (pendidikan) terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan.

3. Untuk mengetahui pengaruh Kapabilitas (pengalaman) terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kapabilitas (pelatihan) terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Ruang Lingkup atau Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus pada titik permasalahan dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti hanya membatasi masalah pada variabel masa kerja, pendidikan, pengalaman mendeteksi kecurangan dan pelatihan kecurangan sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen yaitu tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan terapan dan dapat memberikan informasi serta gambaran Tingkat efektivitas *Red Flags* dalam Mendeteksi kecurangan (*fraud*).

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator dan lembaga profesi untuk menetapkan standar audit yang berhubungan dengan pendeteksian kecurangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para akademis dan pelatih program profesional untuk akuntan publik terkait dengan perkembangan pendidikan akuntansi terutama di dalam

bidang auditing. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengembangkan indikator resiko kecurangan lainnya dengan mempertimbangkan model kecurangan yang sering terjadi di Indonesia. BAB II

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori dan Pengertian variabel

2.1.1 Kapabilitas

Pada dasarnya kapabilitas auditor mempunyai arti yang hampir sama dengan kompetensi yaitu kemampuan. Namun yang dimaksud dengan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan saja, melainkan memahami lebih detail agar benar benar menguasai kemampuan yang dimiliki, mulai dari kelemahan hingga cara mengatasinya.

Menurut Robbins 2001:186 dalam Umama, (2016) Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan tertentu. Keberadaan kemampuan tentunya harus diperhatikan oleh perusahaan, karena dengan kemampuan seseorang akan menghasilkan produk yang bermutu serta benar benar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari tiga faktor yaitu kemampuan intelektual, kemampuan emosi dan kemampuan spritual Agustian (2004:218). Sedangkan kemampuan menurut Robbins ,(2001:46) terbagi menjadi dua yaitu kemampuan fisik dan kemampuan intelektual.

2.1.2 Defenisi Auditor

Auditor merupakan seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsi akuntansi yang berlaku umum di Indonesia Arens, (1995). Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik auditor ialah pemeriksaan “*examination*” secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

2.1.2.1 Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit yaitu dengan memeriksa laporan keuangan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Jika auditor menemukan bahwa laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atau auditor menemukan kecurangan dalam laporan keuangan, auditor bertanggung jawab untuk melaporkan temuannya Alias et al., 2019 dalam (Sandy & Januarti, 2022).

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor juga bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan karena kesalahan ataupun kecurangan. Tentu saja tanggung jawab ini mencakup penilaian atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan penyimpangan signifikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, standard audit dan kode etik akuntan. Apabila terdapat pelanggaran terhadap

penyimpangan etika profesi sebagaimana yang di syaratkan dalam standard auditing dari kode etik akuntan berarti auditor tidak menunjukkan atau tidak mempunyai integritas yang idealisme, khususnya sikap ketergantungan dan tidak menghindar dari berbagai kepentingan.

2.1.2.3 Kompetensi Auditor

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi ini akan mengarahkan kepada tingkah laku, dan tingkah laku tersebut akan menghasilkan kinerja.

Pengertian kompetensi auditor Menurut Rai, (2008) dalam Angelina, (2017) adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional, serta keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, dan simposium. Kompetensi auditor yang semakin tinggi membuat kualitas audit semakin baik.

Standar umum SA seksi 210 dalam SPAP, (2013) dalam (W. A. Ningtyas & Aris, 2018) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Pernyataan tersebut sama halnya dengan pernyataan

standar umum pertama dalam SKPN yaitu pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Pernyataan kedua SKPN adalah “dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstrenal dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Berdasarkan uraian tersebut kompetensi dilihat dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini akan meneliti kompetensi auditor dari sudut pandang masa kerja, pengetahuan, pengalaman auditor dan pelatihan dalam mendeteksi kecurangan.

2.1.2.3.1 Masa Kerja

Masa kerja adalah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu instansi kantor atau sebagainya. Masa kerja erat kaitannya dengan pengalaman dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan auditor. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, contohnya pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keahlian auditor. Selain itu, pengalaman juga mempunyai arti penting dalam upaya perkembangan tingkah laku dan sikap seorang auditor. Pengalaman yang diperoleh auditor menunjukkan dampak bagi penambahan tingkah laku yang dapat diwujudkan melalui keahlian yang dimiliki untuk lebih mempunyai kecakapan yang matang. Bertambahnya waktu bekerja bagi seorang auditor tentu saja akan diperoleh berbagai hal baru menyangkut praktik-praktik audit dan akuntansi yang terjadi pada objek pemeriksaan.

2.1.2.3.2 Tingkat Pendidikan

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar. Auditor dengan terus meningkatkan kompetensinya, maka dapat menjalankan penugasan dengan baik. Selain itu, auditor harus mampu mengidentifikasi dan menguji adanya kecurangan serta mampu memperoleh akses atas informasi aktual.

Menurut Meinhard (1987), mengatakan pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang dilakukannya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks, serta pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit.

2.1.2.3.3 Pengalaman Auditor

Pengalaman adalah salah satu kunci keberhasilan auditor dalam melakukan audit bergantung kepada seorang auditor yang memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal ini pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkannya. Pengertian pengalaman menurut

Foster (2013:40) menyatakan bahwa pengalaman adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Semakin berpengalaman seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sedangkan pengertian auditor menurut Mulyadi menyatakan bahwa Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor adalah seseorang yang mempunyai keahlian serta senantiasa memberikan jasa audit kepada audit untuk memeriksa laporan keuangan agar terhindar dari salah saji sehingga dapat tercapai tujuan untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang audit yang senantiasa melakukan pembelajaran dari kejadian-kejadian di masa yang lalu. Akuntan pemeriksa juga mampu mengidentifikasi secara lebih baik mengenai kesalahan kesalahan dalam telaah analitik. Akuntan pemeriksa yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat perhatian selektif yang lebih tinggi terhadap informasi yang relevan.

2.1.2.3.4 Pelatihan

Pelatihan merupakan sebuah proses pendidikan jangka pendek guna memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang khusus agar mampu untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan yang harus dimiliki dan didapat oleh auditor adalah pengetahuan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan tindakan kecurangan (*fraud*) sehingga tingkat kecurangan (*fraud*) yang kerap terjadi dalam suatu organisasi dapat dicegah dan di deteksi keberadaannya. Pelatihan di bidang *fraud* auditing merupakan salah satu kegiatan pengembangan auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas auditor, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas Kantor Akuntan Publik (KAP) secara keseluruhan.

2.1.3 Red Flags

Istilah *Red Flags* atau bendera merah sudah sering digunakan dalam berbagai literatur audit, yang memiliki tanda – tanda atau gejala tidak biasa yang muncul pada lingkungan sekitar atau sikap seseorang untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Namun, tidak semua gejala tersebut mengidentifikasi kecurangan sehingga memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Dengan kata lain *red flags* merupakan petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. *Red flags* tidak secara mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak namun merupakan tanda peringatan bahwa kecurangan sedang terjadi. Red flags dikatakan penting sebagaimana di kutip dalam SAS 99 – *Consideration of Fraud in*

a Financial Statement Audit yang menyatakan bahwa auditor diminta secara spesifik menilai resiko salah saji yang disebabkan oleh kecurangan dan SAS No 99 ini juga menyediakan pedoman operasi bagi auditor saat menilai kecurangan ditengah proses audit.

Tidak hanya akuntan publik yang harus mengenali red flags, akuntan yang bekerja di sektor publik juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali red flags karena potensi kecurangan tidak hanya ada pada perusahaan swasta. DiNapoli, (2012) dalam *red flags for fraud* menyebutkan bahwa banyak studi yang membahas kecurangan, dimana saat kecurangan tersebut sedang terjadi, *red flags* pun muncul, baik di laporan keuangan, atau terlihat pada saat auditor sedang melakukan pemeriksaan, tapi tidak disadari atau mungkin disadari namun tidak ada tindakan yang diambil.

Dinapoli menyatakan bahwa ketika terdapat red flags, seseorang harus mengambil langkah untuk menyelidiki situasi tersebut dan menentukan apakah kecurangan memang telah terjadi. Memang benar bahwa jika ada tanda – tanda kecurangan, langkah yang harus diambil untuk memverifikasi apakah kecurangan yang ditunjukkan benar benar terjadi, namun terkadang pelaporan keuangan yang salah saji, perubahan gaya hidup karyawan, peningkatan volume penjualan yang tiba tiba naik drastis, dan sebagainya tidak selalu mengindikasi adanya kecurangan.

Menurut Desi Susilawati et al., (2022) *red flags* juga merupakan *early warning signal* atau peringatan dini untuk mengingatkan auditor atas terjadinya

indikasi kecurangan. *Red flags* juga dapat dijuluki sebagai *fingerprint of fraud* yang berarti tanda jejak. Hal tersebut dikarenakan pada setiap kasus kecurangan pasti red flags tidak menunjukkan bahwa seseorang mutlak bersalah, namun pada umumnya *red flags* muncul sebagai sinyal bahwa seseorang telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan.

2.1.4 Theory Fraud

Istilah *fraud* merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin ilmu akuntansi, dan menjadi bagian penting dalam kosa kata audit forensik. *Fraud* jika diartikan secara harfiah, artinya adalah kecurangan. Namun pengertian ini telah berkembang dan sekarang mempunyai cakupan yang luas. *Fraud* (kecurangan) dilakukan atas tujuan yang sama, yaitu untuk memperkaya diri sendiri / golongan dan cara yang dilakukan dalam tujuan memperkaya diri sendiri / golongan tersebut dengan cara yang ilegal. Adapun SAS NO.99 dalam Andriani, (2019) menyatakan fraud adalah tindakan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun, kekeliruan dan kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan, melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip – prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Fraud berbeda dengan perampokan. Perampokan sering kali dilakukan secara paksa, sering kali disertai dengan ancaman dan tindakan kekerasan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, dan perbedaan mendasarnya adalah perampokan tersebut diketahui langsung oleh korban di saat kejadian. Hal ini tidak terjadi pada kasus *fraud*, dalam hal ini *fraud* dilakukan

dengan cara yang canggih, terencana dan terstruktur sehingga korban hampir tidak sadar bahwa dirinya sedang dibohongi atau telah dibohongi. Selain itu jumlah kerugian dalam perampokan tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang timbul dari terjadinya *fraud* pada sebuah perusahaan.

Fraud sering kali terjadi pada bisnis besar, meskipun kasus *fraud* menunjukkan bahwa bisnis kecil pun rentan terhadap *fraud* karena berbagai faktor. Misalnya yang melakukan kecurangan pada perusahaan besar yaitu kasus Enron, jumlah kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan kerugian tersebut tidak hanya berasal dari uang investor yang disalahgunakan tetapi juga manajemen perusahaan menggunakannya untuk tujuan yang salah, tetapi juga dengan dukungan manajemen perusahaan yang dibantu oleh auditor eksternal dan internal yang dibawah oleh pimpinan KAP Arthur Andersen, dana pensiun para karyawan juga lenyap disalahgunakan.

2.1.4.1 Gejala Fraud

Seorang auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal harus mampu mengenali klasifikasi gejala *fraud* yaitu manajemen dan pegawai karyawan. *Fraud* yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pegawai karyawan. Oleh karena itu perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya *fraud* tersebut.

1) Gejala *Fraud* pada Manajemen

Gejala awal *fraud* manajemen dapat dilihat sebagai *red flags*, misalnya adanya ketidakcocokan antara manajemen senior dalam menentukan kebijakan

perusahaan, menurunnya motivasi karyawan karena hilangnya kepercayaan terhadap manajemen, tingginya tingkat keluhan dari pelanggan, pemasok atau otoritas terkait, kekurangan arus kas yang terjadi secara tidak terstruktur karena pengeluaran yang tidak tercatat atau tidak terdokumentasi, terdapat kelebihan persediaan yang signifikan, kinerja perusahaan menurun, utang bertambah dan tidak terbukti adanya kompensasi.

2) Gejala *Fraud* pada Karyawan

Gejala awal terjadinya *fraud* karyawan muncul dan menjadi *red flags* bagi auditor, misalnya biaya keuangan, tanda tanda dokumentasi pendukung, seringnya kesalahan pencatatan atau pencatatan transaksi yang tidak akurat, bukti transaksi sebagai dokumen sumber seringkali tidak dapat disajikan karena hilang, terjadinya kekurangan barang pembelian, Perusahaan sering tidak profesional dalam kuantitas dan kualitas, harga persediaan terlalu tinggi dibandingkan sebelumnya dan pembukuan perusahaan disesuaikan tanpa bukti izin manajemen.

2.1.4.2 Fraud Tree Theory

Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Dewi, Rozmita dan Apandi, (2012) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini menggambarkan cabang – cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. *Fraud tree* ini disajikan dalam bagan, bagan tersebut tidak dapat diterjemahkan artinya karena tidak selalu ada istilah yang menggambarkan makna aslinya. Para akuntan memahami istilah

bahasa inggris dalam *fraud tree*, karena itu adalah istilah yang lazim digunakan dalam buku teks akuntansi dan auditing. *Fraud tree* ini mempunyai tiga cabang utama yaitu *corruption*, *Asset Misappropriation*, dan *Fraudulent statements*.

2.1.4.2.1 Corruption

Istilah *corruption* disini tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan perundang undangan. Istilah korupsi menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi, dan empat bentuk yang digambarkan dalam ranting-ranting yaitu :

1. *Conflicts of interest* atau benturan kepentingan yang sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga – lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun.
2. *Bribery* atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. Kasus kasus tindak pidana korupsi tahun ke tahun menunjukkan hal ini, oleh karena itu tidak perlu ada uraian yang panjang tentang ranting ini.
3. *Illegal gratuities* adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Dalam kasus korupsi di Indonesia kita melihat hal ini dalam bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan lain – lain yang diberikan kepada pejabat.
4. *Economic extortion* adalah ancaman yang merupakan pemerasan. Dalam hal *kickback*, si pembuat keputusan (atau yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan) dapat “mengancam” sang rekanan. Ancaman ini bisa terselubung

tetapi tidak jarang pula dilakukan secara terbuka. Indikasinya adalah sang rekanan “tidak terpakai” lagi meskipun dalam kebanyakan hal ia lebih unggul dari rekanan pemenang.

2.1.4.2.2 Asset Misappropriation

Asset Misappropriation atau “pengambilan” asset secara illegal dalam bahasa sehari – hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum “mengambil” asset secara illegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi asset tersebut, disebut menggelapkan. Cabang dan ranting yang menggambarkan *fraud* dari *asset misappropriation*.

1. Yang sering menjadi sasaran penjarahan adalah uang (baik di kas bank, yang di bank, baik yang berupa giro, tabungan maupun deposito). Uang tunai atau uang di bank yang menjadi sasaran, langsung dapat dimanfaatkan oleh pelakunya. Asset misappropriation akan dijelaskan sebagai berikut :
 - a. *Skimming*. Dalam *skimming* uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam *fraud* yang sangat dikenal para auditor, yakni *lapping*.
 - b. *Larcency* kalau uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan asset (*safeguarding of assets*).
 - c. *Fraudulent disbursements*, pencurian ini melalui pengeluaran yang tidak sah.

Billing schemes adalah skema permainan (*schemes*) dengan menggunakan proses *billing* atau pembebanan tagihan sebagai sasarannya.

Payroll schemes adalah skema permainan melalui pembayaran gaji. Bentuk permainannya antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif atau dalam pemalsuan jumlah gaji.

Expense reimbursement schemes adalah skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan. Seorang salesmen mengambil uang muka perjalanan, dan kembalinya dari perjalanan, ia membuat perhitungan biaya perjalanan. Kalau biaya perjalanan melampaui uang mukanya, ia meminta *reimbursement* ini.

Check tampering adalah skema permainan melalui pemalsuan cek. Yang dipalsukan tandatangan orang yang mempunyai kuasa mengeluarkan cek, nama kepada siapa cek dibayarkan, atau cek disembunyikan.

Register disbursements adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam *cash register*. Skema permainan melalui *register disbursements* pada dasarnya ada dua *false refunds* (pengembalian uang yang dibuat-buat) dan *false voids* (pembatalan palsu). Dalam *false refunds* ada berbagai cara penggelapan, di antaranya penggelapan dengan seolah-olah ada pelanggan yang mengembalikan barang dan perusahaan memberikan *refunds* sedangkan *false voids* yang dipalsukan adalah pembatalan penjualan.

2. Sasaran lain dari penjarahan adalah persediaan barang (*inventory*). Umumnya daya tarik untuk mencuri kas lebih tinggi dari aset lainnya. Namun dalam situasi ini persediaan barang sangat menarik untuk dijadikan sasaran

pencurian. Contohnya penjualan BBM bersubsidi secara ilegal pada waktu disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan yang tidak bersubsidi. Aset lainnya yang bukan kas atau persediaan juga bisa menjadi sasaran yaitu aktiva tetap, misalnya kendaraan bermotor yang tidak bersubsidi.

2.1.4.2.3 Fraudulent Statements

Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit (opinion audit). Ranting pertama dalam menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan keuangan. *Fraud* ini berupa salah saji yaitu menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya dan menyajikan asset dan pendapatan lebih rendah dari yang seharusnya.

Ranting kedua menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan non keuangan. *Fraud* ini berupa penyampaian laporan non keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan, bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern maupun extren.

2.1.4.3 Manfaat Fraud Tree

Fraud tree yang dibuat oleh ACFE sangat bermanfaat. *Fraud tree* ini bermanfaat untuk memetakan *fraud* dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu auditor untuk mengenali dan mendiagnosis *fraud* yang terjadi. Ada gejala “penyakit” *fraud* dalam auditing yang dikenal dengan *red flags*. Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi *fraud* tersebut. (Sukirman & Sari, 2013).

2.1.4.4 Fraud Diamond Theory

Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey, (1953). Di dalam *fraud triangle* terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*oppurtinity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Wolfe & Hermanson, (2004) menambahkan satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi adanya *fraud*, yaitu faktor kemampuan (*capabilty*), sehingga menjadi empat faktor yang disebut dengan *fraud Diamond*. (Paulus Libu Lamawitak & Emilianus Eo Kutu Goo, 2021).

Fraud diamond adalah suatu faktor yang menjadikan alasan bagi setiap individu untuk melakukan tindakan kecurangan karena adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi dimana ketiga faktor tersebut dapat terjadi jika individu memiliki kemampuan dalam melakukan *fraud*. *Capability* adalah sifat kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Menurut Wolfe dan Hermanson, (2004) pada Ristianingsih, (2017) berpendapat bahwa:

“Many Frauds, especially some of the multibillion-dollar ones, would not have occurred without the right person with the right capabilities in place. Opportunity opens the doorway to Fraud, and incentive and Rationalization can draw the person toward it. But the person must have the Capability to recognize the open doorway as an Opportunity and to take advantage of it by walking through, not just once, but time and timeagain. Accordingly, the critical question is; Who could turn an Opportunity for Fraud into reality?”

Artinya adalah banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. *Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraud*, sedangkan *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. (Ristianingsih, 2017).

Tetapi seseorang tersebut harus memiliki *capability* untuk mengenali pintu yang terbuka sebagai peluang dan mengambil keuntungan apa yang dijalani bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Berdasarkan hal tersebut pertanyaan kritik yang diajukan adalah siapa yang bisa mengubah peluang untuk kecurangan menjadi kenyataan.

Dalam perkembangan hipotesis lebih dikenal sebagai *fraud diamond*, seperti yang digambarkan dibawah ini:

Pressure

Oppurtinity



Rationalization

Capability

Gambar 2.1. Fraud Diamond

Sumber : Asih Cahyani (2016)

2.1.4.4.1 Pressure

Pressure atau tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang di pandang sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Maka oleh karena itu si pelaku kecurangan mulai mempertimbangkan tindakan ilegal seperti penyalahgunaan aset perusahaan atau melakukan salah saji yang di sengaja pada laporan keuangan untuk menyelesaikan masalah keuangannya.

2.1.4.4.2 Oppurtinity

Oppurtinity atau kesempatan yaitu adanya ketersediaannya kesempatan melakukan *fraud*. Kesempatan ini umumnya timbul di dalam sistem pengendalian yang lemah. Jika sebuah perusahaan memiliki sistem pengendalian yang lemah maka kesempatan untuk melakukan *fraud* akan timbul. Meskipun demikian sistem pengendalian yang bagus pun tetap memunnkinkan terjadinya *fraud* yang umumnya dilakukan oleh mereka yang merupakan orang kepercayaan atau yang memiliki wewenang.

2.1.4.4.3 Rationalization

Rationalization atau rasionalisasi yaitu pelaku yang memiliki alasan rasional (pembenaran) atas tindakan *fraud* yang dilakukan. Rasionalisasi umumnya berkaitan dengan integritas, kode etik dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Rasionalisasi tindakan *fraud* umumnya disebabkan oleh perasaan digaji terlalu

rendah, perasaan bahwa semua orang melakukan hal yang sama, percaya bahwa *fraud* merupakan utang dan akan dibayar kembali.

2.1.4.4.4 Capability

Capability atau kemampuan adalah sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama yang menyebabkan *fraud* benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga elemen lainnya. Kemampuan adalah sifat individu yang melakukan *fraud*, yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya untuk melakukan kecurangan. Pendapat ini menyatakan selain faktor lingkungan faktor perilaku juga ikut dipertimbangkan sebagai prediktor *fraud*.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Kapabilitas Auditor Atas Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan”. Peneliti merujuk pada jurnal ilmiah akuntansi dan hasil penelitian terdahulu. Untuk lebih rinci, referensi yang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Study Empiris

No	Nama Penelitian	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Wayan Rustiarini, Ni Luh Gde Novitasari	2014	Persepsi Auditor atas Tingkat Efektivitas Red Flags dalam Mendeteksi	Posisi pekerjaan (X1), Masa Kerja(X2), Pendidikan	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : pendidikan, pengalaman mendeteksi kecurangan, pelatihan kecurangan

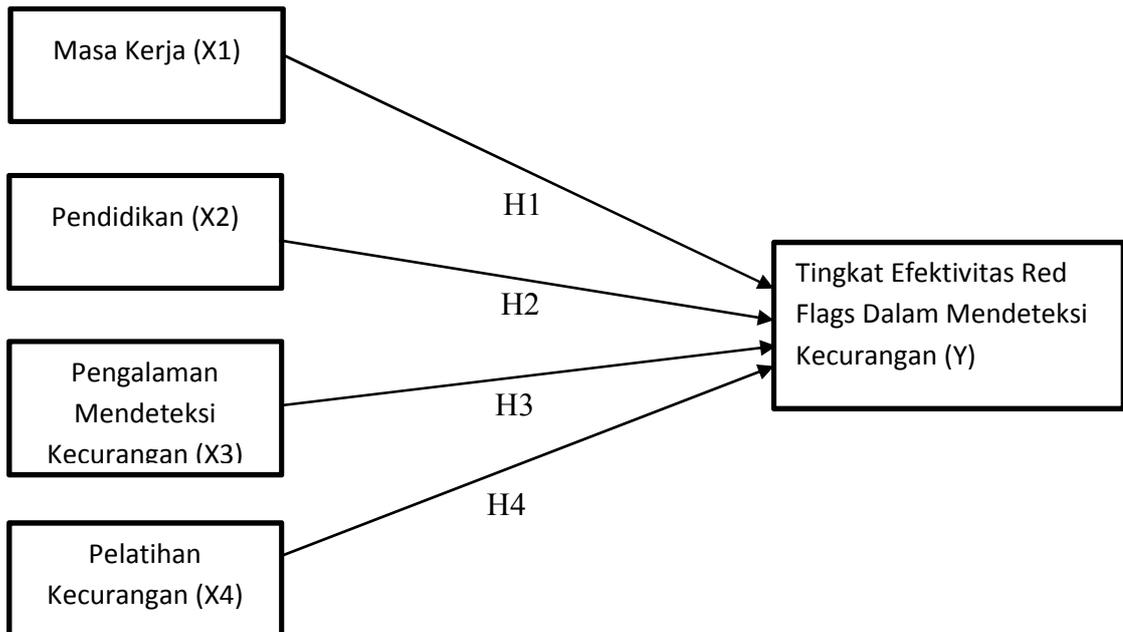
			Kecurangan	(X3), Pengalaman Mendeteksi kecurangan (X4), Pelatihan tentang kecurangan (X5), Persepsi Auditor atas Tingkat Efektivitas Red Flags dalam mendeteksi Kecurangan (Y).	berpengaruh pada persepsi auditor untuk mendeteksi kecurangan, sedangkan posisi pekerjaan, masa kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor atas efektivitas red flags dalam mendeteksi kecurangan.
2	Faisal Mardani	2017	Persepsi Auditor atas Tingkat Efektivitas Red Flags dalam Mendeteksi Kecurangan (Pada Kantor Akuntan Publik Kota Pekanbaru).	Masa Kerja (X1), Pendidikan (X2), Pengalaman (X3), Pelatihan (X4), Kemampuan berpikir (X5), Independensi (X6), Skeptisisme Profesional (X7), Persepsi Auditor atas Efektivitas Red Flags dalam mendeteksi Kecurangan (Y).	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : masa kerja, pendidikan, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap persepsi auditor atas tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi kecurangan sedangkan pelatihan dan kemampuan berfikir tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor atas tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi kecurangan.
3	Krisarlangga Rio	2018	Pengaruh Independensi,	Independensi (X1),	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa :

	Putra		Pengalaman, dan Penerapan Aturan Etika terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.	Pengalaman (X2), Penerapan Aturan Etika (X3), Pendeteksian Kecurangan (Y).	independensi, pengalaman dan penerapan aturan etika masing-masing memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.
4	Natasya Ruth Agatha Takasensurang	2022	Pengaruh Pengalaman, Skeptisisme Profesional, Penerapan Aturan Etika, Task Specific Knowledge, Red Flags, dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang).	Pengalaman (X1), Skeptisisme Profesional (X2), Penerapan Aturan Etika (X3), Task Specific Knowledge (X4), Red Flags (X5), Beban Kerja (X6), Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Y).	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : skeptisisme profesional, task specific knowledge berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, penerapan aturan etika, red flags berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan pengalaman, beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
5	Fabio Bolanda Sandy, Indira Januarti	2022	Persepsi Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Kantor Akuntan Publik.	Pengalaman Auditor (X1), Pelatihan Audit (X2), Resiko Audit (X3). Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Y).	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : Pengalaman auditor, Pelatihan audit, memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan resiko audit tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Sumber : Diolah Peneliti (2024)

2.3 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Teoritis



Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti (2024)

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

2.3.2.1 Pengaruh Masa Kerja terhadap Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada suatu organisasi, lembaga dan sebagainya. Masa kerja seseorang dalam organisasi perlu diketahui karena masa kerja merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para pekerja dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Misalnya agar produktivitas kerja, semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi pula produktivitasnya

karena semakin berpengalaman dan mempunyai keterampilan yang baik dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan hasil penelitian (Mardani, 2019) masa kerja berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian (Fitriani, 2020) menunjukkan hasil masa kerja berpengaruh terhadap mendeteksi kecurangan.

H₁ : Masa Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan

2.3.2.2 Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan

Pengetahuan auditor sangat berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Seorang auditor yang memiliki wawasan yang luas, tingkat pendidikan yang tinggi, serta ilmu dan pelatihan yang dimiliki selama menjadi auditor merupakan dasar yang digunakan dalam melakukan audit untuk melacak adanya temuan kecurangan. Tingkat pengetahuan yang dimiliki auditor merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrizal, (2010) bahwa pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian Putri & Jualiarsa, (2014) berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Menurut penelitian Sandy & Januarti, (2022) menunjukkan hasil pendidikan berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Pengetahuan auditor berpengaruh besar terhadap pendeteksian

kecurangan karena dengan pengetahuan yang cukup dimilikinya, auditor akan lebih mampu dan cepat dalam melakukan langkah-langkah audit untuk mencari setiap hal atau permasalahan yang kritis menjadi modus kecurangan atau penyimpangan. Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang auditor, auditor tidak hanya akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan audit secara efektif tetapi juga akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal.

H₂ : Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan

2.3.2.3 Pengaruh Pengalaman terhadap Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Rio, (2018) Semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bekerja, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki pekerja tersebut Sukriah, (2009). Oleh karena itu, dengan bertambahnya pengalaman auditing, jumlah kecurangan yang diketahui oleh auditor diharapkan akan bertambah. Berdasarkan hasil penelitian (Anggriawan, 2014) menunjukkan hasil bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian (Syifa Hasna Iftinan & Edi Sukarmanto, 2022) menunjukkan hasil bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Menurut penelitian (Futri & Jualiarsa, 2014) menunjukkan hasil bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan.

H₃ : Pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan

2.3.2.4 Pengaruh Pelatihan terhadap Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Ley, (2002) dengan adanya pelatihan yang sistematis dan berjenjang sesuai dengan tingkatan auditor, maka akan mempermudah auditor untuk melengkapi kekurangan auditor dan memberikan penekanan pada praktik audit dan standar akuntansi bagi auditor. Auditor membutuhkan berbagai keterampilan dan keahlian tertentu dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam mendeteksi kecurangan oleh sebab itu memerlukan adanya pelatihan. Bila seorang auditor semakin sering mengikuti pelatihan maka akan semakin banyak mengembangkan pengetahuan yang spesifik mengenai bidang audit, sehingga auditor tidak mengalami kesulitan dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian (Primasatya & Hady, 2022) menunjukkan hasil bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian (Rizky & Wibowo, 2019) menunjukkan hasil bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Menurut penelitian (Ulfa Novita, 2015) menunjukkan hasil bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan.

H₄ : Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, terlebih dahulu harus ditentukan populasi yang akan diteliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono, (2018:130) pada M. Ningtyas, (2018) mengenai populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian hari di tarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Medan yang terdaftar pada Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

3.1.2 Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan pendekatan dalam pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria dari persyaratan yang diperlukan untuk sampel tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 KAP dari 24 KAP yang terdaftar dengan jumlah auditor sebanyak 46 responden.

Kriteria khusus yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Auditor bekerja lebih dari 1 Tahun.
2. Tingkat Pendidikan minimal Diploma.
3. Berpengalaman menemukan fraud minimal 1 kali.
4. Pernah mengikuti pelatihan.

Tabel 3.1 Kriteria Penarikan Sampel Pada Kantor Akuntan Publik

Keterangan	Jumlah
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2023 di Kota Medan	25
Kantor Akuntan Publik Yang Tidak Aktif	(5)
Kantor Akuntan Publik yang sudah tidak menerima perijinan untuk melakukan penelitian	(13)
Jumlah sampel	7

Berikut adalah daftar sampel yang dipakai dalam penelitian ini :

Tabel 3.2 Sampel pada Kantor Akuntan Publik

NO	NAMA KAP	JUMLAH AUDITOR
1	KAP SYAMSUL BAHRI, MM, Ak & REKAN	10
2	KAP Drs. KATIO & REKAN	6
3	KAP FACHRUDIN & MAHYUDDIN	5
4	KAP Drs. SELAMAT SINURAYA & REKAN	8
5	KAP LIASTA, NIRWAN, SYAFRUDDIN & REKAN (CABANG)	2
6	KAP Drs. DARWIN S. MELIALA	5
7	KAP TOGAR MANIK	10
	Jumlah	46

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2024)

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu data kuantitatif, data kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori atau hipotesis dengan cara meneliti hubungan antara variabel, yang bertujuan untuk mengembangkan teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer, data primer adalah data penelitian yang langsung diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu dari tempat penelitian. Dimana data diperoleh dari wawancara terstruktur dan kuesioner dengan Auditor di Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi yang mengumpulkan beberapa data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, serta mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan, buku, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi yang mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Kuesioner/Angket, yaitu teknik pengumpulan data primer yang diajukan kepada Auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Medan yang dilakukan melalui tanggapan, opini, dan sikap dengan harapan mereka dapat memberikan respon dan tanggapan yang positif atas daftar pertanyaan yang diajukan tersebut.

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang membentuk apa saja yang diterapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen (variabel terikat), dan yang menjadi variabel independen adalah masa kerja, pendidikan, pengalaman mendeteksi kecurangan dan pelatihan mendeteksi kecurangan.

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dan yang menjadi variabel dependen tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Tabel 3.1. Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala	Instrumen
Masa Kerja (X1)	Masa kerja adalah lamanya hubungan antara partner dari Kantor Akuntan Publik terhadap klien. Masa kerja yang panjang dapat meningkatkan kualitas audit. (Martha et al., 2021)	1.Kualitas auditor mendeteksi kecurangan 2. Profesional dalam mendeteksi kecurangan	Ordinal	Kuesioner/Angket
Pendidikan (X2)	Pendidikan adalah mengukur tingkat pendidikan yang dicapai oleh auditor yang diperoleh dari lembaga pendidikan formal atau sekolah dan mendapatkan gelar secara akademik. (Nurkholis,	1.Pendidikan yang ditempuh oleh auditor	Ordinal	Kuesioner/Angket

	2020)			
Pengalaman (X3)	Pengalaman audit adalah proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi serta proses yang membawa seseorang menuju sesuatu yang lebih tinggi. (Junia putri, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama melakukan audit 2. Jumlah klien yang sudah di audit 3. Jenis perusahaan yang pernah di audit 	Ordinal	Kuesioner/Angket
Pelatihan (X4)	Pelatihan adalah suatu kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam mengembangkan tugasnya sehingga memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi kecurangan. (Wulandari et al., 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan yang diikuti auditor 2. Berpikir cepat dan terperinci 	Ordinal	Kuesioner/Angket
Tingkat	Fraud	1. Memiliki	Ordinal	Kuesioner/Angket

Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Kecurangan (Y)	adalah suatu tindakan yang disegaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. (Mia Tri Puspitaningrum et al., 2019)	keahlian dan pengetahuan 2. Memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi 3. Memiliki keakuratan dan kecermatan		ket
---	---	--	--	-----

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Pada penelitian ini skala pengukuran data digunakan adalah skala ordinal, maka peneliti akan melakukan transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval menggunakan *Method Of Successive Interval (MSI)*. Menurut Sugiyono, (2016:133) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya akan disebut sebagai variabel penelitian. Penjaringan jawaban responden menggunakan kuesioner dengan skala likert, untuk setiap pertanyaan positif dan negatif diberi nilai sebagai berikut :

Tabel 3.2. Bobot Nilai Pertanyaan

No.	Interval Jawaban	Bobot Nilai	
		Positif	Negatif
1.	Sangat Setuju	5	1
2.	Setuju	4	2
3.	Ragu-ragu	3	3
4.	Tidak Setuju	2	4
5.	Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber : Sugiyono, (2016:94)

3.4 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.4.1 Teknik Analisis Data

3.4.1.1 Statistik Deskriptif

Kegiatan analisis dalam menyimpulkan data-data yang cukup besar sehingga menjadi ringkas dan bias ditafsirkan. Metode analisis deskriptif biasanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam

deskriptif antara lain frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), disperse (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

3.4.1.2 Uji Validitas

Uji validitas untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan signifikan $<0,05$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ dan signifikan $>0,05$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid.

3.4.1.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hal pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama. Reliabilitas kuesioner menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Keandalan suatu alat ukur menunjukkan ketepatan, kemantapan, suatu alat ukur yang baik. Dalam hal ini kuesioner berisi pernyataan yang jelas sehingga hasilnya memang benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode *cronbach alpha*. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $>0,6$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model dalam regresi, yang diteliti mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Dalam penelitian ini uji normalitas yang akan dilakukan dengan analisis statistik. Uji normalitas ini menggunakan teknik *Kolmogrov-Smirnov* (uji K-S). Uji K-S ini dilakukan untuk membuat hipotesis.

- a. Jika nilai *Asymp.Sig* $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- b. Jika nilai *Asymp.Sig* $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari Uji Multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam persamaan regresi. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian, yang tidak melebihi 4 atau 5. Pendeteksian terhadap Multikolinearitas dapat

dilakukan dengan melihat Variance Inflating Factor/VIF dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bila $VIF > 10$ maka terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.
2. Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.

3.4.2.3 Uji Heteroskedasitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik yaitu terjadinya heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas dilakukan dengan melihat grafik.

3.4.3 Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Persamaan Regresi Linear Berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Efektivitas Red Flags dalam Mendeteksi Kecurangan

X_1 = Masa Kerja

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Pengalaman Mendeteksi Kecurangan

X_4 = Pelatihan

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Faktor lain di luar model

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji t

Untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen digunakan uji-t atau disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Formula uji-t adalah sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

r = korelasi

n = banyaknya sampel

t = tingkat signifikan (t_{hitung}) yang selanjutnya di bandingkan dengan t_{tabel}

Adapun bentuk pengujiannya adalah :

- a. $H_0 : \beta = 0$, Masa kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
- b. $H_a : \beta \neq 0$, Masa kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat efektivitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Sedangkan kriteria untuk pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ (atau dalam program SPSS, pada tabel coefficient, nilai sig penelitian $< \alpha = 0,05$), maka H_0 harus ditolak, yang berarti masing-masing variabel independen secara parsial, berpengaruh nyata terhadap variabel dependen pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$
- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (atau dalam program SPSS, tabel coefficient, nilai sig penelitian $< \alpha = 0,05$), maka H_0 harus diterima, yang berarti masing-masing variabel independen secara parsial, tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$.

3.4.4.2 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (KD) merupakan besarnya persentase pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dapat digunakan Koefisien Determinasi (KD) dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi *product moment pearson's*

Koefisien Determinasi (KD) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai KD yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

